

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN  
KELURAHAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN  
PUBLIK DI KELURAHAN OI MBO KOTA BIMA  
TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh Gelar sarjana (S1)



**DI SUSUN OLEH :**

**MUHAMMAD PHALEVY**

NIM. 218130064

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN  
KELURAHAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN  
PUBLIK DI KELURAHAN OI MBO KOTA BIMA  
TAHUN 2020**

Disusun dan diajukan oleh :  
**MUHAMMAD PHALEVY**  
**NIM. 218130064**

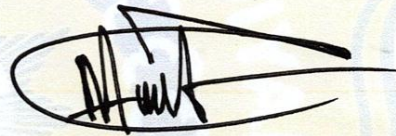
Telah memenuhi syarat dan disetujui  
Mataram, 27 Juni 2023

**Pembimbing I**



**Drs. Amil. MM**  
**NIDN.0831126204**

**Pembimbing II**



**Muhammad Aprian Jailani. S.AP., M.AP**  
**NIDN.080409501**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Yudhi Lestapata., S.IP., M.IP**  
**NIDN.082711801**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN  
KELURAHAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN  
PUBLIK DI KELURAHAN OI MBO KOTA BIMA  
TAHUN 2020**

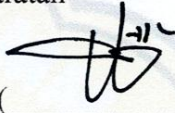
Oleh :

**MUHAMMAD PHALEVY**  
NIM. 218130064

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 30 Juni 2023  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji:

**Drs. Amil, MM**  
NIDN. 0831126204

(PU) (  )

**Muhammad Aprian Jailani, S.AP., M.AP**  
NIDN. 080409501

(PP) (  )

**Dr. Iwan Tanjung Sutarna, S.IP., M.PA**  
NIDN. 0806058402

(PN) (  )

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 080606681

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : MUHAMMAD PHALEVY

NIM : 218130064

Memang benar bahwa skripsi yang berjudul: “EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KELURAHAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN OI MBO KOTA BIMA TAHUN 2020 merupakan karya sendiri dan belum ada yang mengajukan untuk mendapatkan gelar Akademik ditempat manapun.

Skripsi ini merupakan murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun, kecuali arahan dari pembimbing. Jika memiliki karya atau pendapat dari orang lain yang telah dipublikasikan, maka itu diacu sebagai sumber dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 30 Juni 2023  
Yang Membuat Pernyataan



**MUHAMMAD PHALEVY**  
**NIM : 218130064**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Phalevy  
 NIM : 218130064  
 Tempat/Tgl Lahir : Pendaraga 3 Juni 2001  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Fakultas : Fisipol  
 No. Hp : 082 341 474 769  
 Email : Muhammadphalevy@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Evaluasi Kebijakan Pemecaran Kelurahan Terhadap Kinerja  
 Pelayanan Publik Di Kelurahan Ol MBO Kota Bima Tahun 2020

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 44%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 20 Juli .....2023

Penulis



Muhammad Phalevy  
 NIM. 218130064

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Phalevy  
NIM : 218130064  
Tempat/Tgl Lahir : Pinaraga, 03 Juni 2001  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Fisipol  
No. Hp/Email : 082 341 474 769 /muhammadphalevy@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Evaluasi Kebiasakan Pemekaran Kelurahan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Kelurahan Olimbo Kota Bima Tahun 2020

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 20 Juli ..... 2023  
Penulis



Muhammad Phalevy  
NIM. 218130064

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A. udy  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

Jangan ubah dirimu hanya agar mereka menyukaimu.  
Hebatkan dirimu agar mau tidak mau mereka harus  
menerimaamu.



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobil alamin, atas rahmat dan hidayahnya Allah SWT yang telah meridhoi saya dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta bapak dan ibu saya ucapkan terimakasih banyak atas doanya, cintanya, kasih-sayangannya, dukungannya, motivasinya, serta semangat yang tiada henti kalian berikan.
2. Untuk keluarga saya tercinta terimakasih atas motivasi dan dorongan yang sudah diberikan.
3. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabatku yang tidak ku sebut namanya satu-persatu terimakasih atas dukungan dan dorongan yang sudah kalian berikan.
4. Para dosen dan staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu membimbing, mendidik dan mengajarkan. Terimakasih untuk jasa-jasa yang tidak mampu terbalaskan.
5. Kampus Hijau dan Almamater kebanggaanmu Universitas Muhammadiyah Mataram.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kekuatan yang diberikan Allah SWT kepada penulis untuk bisa menyelesaikan amanah penulisan skripsi ini dan segala kewajibanku sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Pemekaran Kelurahan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Kelurahan Oi Mbo Kota Bima Tahun 2020”** tepat pada waktunya. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber inspirasi umat islam untuk terus berjuang dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Penelitian ini dilaksanakan untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Drs.Amil, MM selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Aprian Jailani, S.AP., M.AP selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik umumnya dan khususnya Dosen-Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
6. Kedua Orang Tua Saya Tercinta yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kelemahannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pada masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi penulis pribadi dan pembaca pada umumnya.

Mataram, 30 Juni 2023

Penulis

**Evaluasi Kebijakan Pemekaran Kelurahan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Kelurahan Oi Mbo Kota Bima Tahun 2020**

Oleh :  
**Muhammad Phalevy**

**ABSTRAK**

Pemekaran Wilayah merupakan sebagai salah satu upaya Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan dari Otonomi Daerah. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis hasil evaluasi kebijakan pemekaran wilayah Kelurahan Oi Mbo Kota Bima. mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan publik melalui kebijakan pemekaran Kelurahan Oi Mbo Kota Bima. Jenis penelitian menggunakan metode dekriptif kualitatif, dengan memperoleh data-data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Responden pada penelitian ini adalah menggunakan *purpove sampling* yaitu salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja karena sudah menentukan sumber informan sesuai keinginan peneliti.

hasil penelitian ini menunjukkan Penyelenggaraan pelayanan publik setelah pemekaran lebih responsif atas kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan partisipatif. Masyarakat mengharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik setelah kelurahan oi mbo mekar antara lain semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam wujud pelayanan yang cepat, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan, aman, tepat, biaya yang wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

***Kata Kunci : Evaluasi, Pemekaran kelurahan, Pelayanan Publik.***

***Policy Evaluation of Urban Village Expansion and its Impact on Public Service Performance in Oi Mbo Village, Bima City, 2020***

*By: Muhammad Phalevy*

**ABSTRACT**

*One strategy used by the central government to improve public services and speed up growth is territorial expansion. Regional autonomy will be a crucial component of the success of the decentralization of areas. The purpose of this study is to comprehend and evaluate the findings of the policy assessment about the growth of Oi Mbo Village in Bima City. Through the expansion of Oi Mbo Village, it also aims to discover and examine the elements affecting the success of public services. Data are gathered for the study using a qualitative descriptive methodology, including interviews, observations, and documentation. Purposive sampling, an intentional method to choose informants in accordance with the researcher's preferences, is used to choose respondents in this study. The findings of this research indicate that public service provision after the expansion has become more responsive to the community's needs, and the administration of public services has become more transparent and participatory. The community expects an improved quality of public services after the establishment of Oi Mbo Village, including faster, easier, fair, legally certain, transparent, secure, accurate, reasonably priced, and accountable service provision.*

***Keywords: Evaluation, Urban Village Expansion, Public Services.***

**MENGESAHKAN**  
**SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA**  
**MATARAM**

**KEPALA**  
**UPT P3B**  
**MUHAMMAADIYAH MATARAM**



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                          | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>              | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>              | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>        | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>     | <b>v</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b> | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                                  | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                             | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                          | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                | <b>xi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                               | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                              | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                           | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                       | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                            | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                           | 8           |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                          | 8           |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                         | 9           |
| 1.4.1 Secara Akademis .....                         | 9           |
| 1.4.2 Secara Teoritis .....                         | 9           |
| 1.4.3 Secara Praktis .....                          | 9           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                 | <b>10</b>   |
| 2.1 Penelitian Terdahulu.....                       | 10          |
| 2.2 Landasan Teori .....                            | 15          |
| 2.2.1 Konsep Evaluasi .....                         | 15          |
| 2.2.2 Evaluasi Kebijakan Publik .....               | 17          |
| 2.2.3 Tahapan Evaluasi Kebijakan .....              | 18          |
| 2.2.4 Pemekaran Wilayah.....                        | 19          |
| 2.2.5 Tujuan Pemekaran Wilayah .....                | 21          |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.2.6 Kelurahan .....   | 25        |
| 2.2.7 Kinerja .....   | 27        |
| 2.2.8 Pelayanan publik .....                                  | 28        |
| 2.2.9 Kinerja Pelayanan Publik .....                          | 30        |
| 2.3 Kerangka Berpikir .....                                   | 33        |
| 2.4 Definisi Konseptual dan Operasional .....                 | 35        |
| 2.4.1 Definisi Konseptual .....                               | 35        |
| 2.4.2 Definisi Operasional .....                              | 36        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                        | <b>38</b> |
| 3.1 Metode Penelitian .....                                   | 38        |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....                         | 39        |
| 3.3 Pemilihan Narasumber atau Responden .....                 | 39        |
| 3.4 Sumber dan Jenis Data .....                               | 40        |
| 3.4.1 Data Primer .....                                       | 40        |
| 3.4.2 Data Sekunder .....                                     | 40        |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....                             | 40        |
| 3.5.1 Teknik Observasi .....                                  | 40        |
| 3.5.2 Teknik Interview (Wawancara) .....                      | 41        |
| 3.5.3 Teknik Dokumentasi .....                                | 41        |
| 3.6 Teknik Analisa Data .....                                 | 41        |
| 3.6.1 Reduksi Data .....                                      | 41        |
| 3.6.2 Tampilan Data .....                                     | 42        |
| 3.6.3 Gambar Kesimpulan .....                                 | 42        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>            | <b>43</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                     | 43        |
| 4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Oi Mbo .....                    | 43        |
| 4.1.2 Visi dan Misi Kelurahan Oi Mbo .....                    | 47        |
| 4.1.3 Tugas dan Fungsi Kelurahan Oi Mbo .....                 | 49        |
| 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....                          | 54        |
| 4.2.1 Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan di Kelurahan Oi Mbo..... | 54        |
| 4.2.2 Kebijakan Pemekaran Wilayah di Kelurahan Oi Mbo.....    | 66        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4.2.3 Pelayanan Publik .....           | 70        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b> | <b>75</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                    | 75        |
| 5.2 Saran.....                         | 76        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>            | <b>77</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                        |           |



## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. Data SDM Pegawai Kelurahan Oi Mbo.....                     | 5  |
| Table 2.1 Penelitian terdahulu.....                                 | 14 |
| Table 3.1 Narasumber .....  | 41 |
| Tabel 4.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.....            | 46 |
| Tabel 4.2. Tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Oi Mbo .....    | 47 |
| Tabel 4.3 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Kelurahan Oi Mbo ..... | 56 |
| Tabel 4.4 Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat.....         | 57 |
| Tabel 4.5. Data pelayanan jumlah surat keterangan .....             | 61 |
| Tabel 4.6 Prasarana Pemerintahan .....                              | 63 |
| Tabel 4.7 Prasarana Transportasi Darat .....                        | 65 |
| Tabel 4.7 Aparat Pemerintahan Kelurahan Oi Mbo.....                 | 67 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah diberlakukan, beberapa wilayah yang ada di Indonesia mengajukan diri sebagai daerah otonom baru guna mendapatkan kekuatan lebih terkait menangani pembangunan dan kesejahteraan di daerahnya. Pembentukan daerah otonom baru atau yang disebut pemekaran daerah memungkinkan daerah menguasai sumber daya nasional yang ada di daerahnya sendiri. Pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan negaranya sesuai dengan undang-undang. Selain itu, daerah berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri dan keinginan masyarakatnya terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya, otonomi daerah memberi daerah kekuasaan menentukan kebijakan serta keuangan dan bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah untuk memperkuat koherensi sosial antara politik dan masyarakat.

Bentuk upaya pemerintah terkait pemekaran wilayah sebagai perwujudan untuk meningkatkan pelayanan dan percepatan pembangunan. Ekspansi regional juga serta kemandirian daerah diharapkan sebagai salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah. Pemekaran daerah dipandang sebagai terobosan dalam percepatan pembangunan dengan meningkatkan kualitas dan

memfasilitasi peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan manajemen pembangunan agar kesejahteraan masyarakat tumbuh sesuai dengan harapan dan tujuan pemekaran. Sisi positifnya, pemekaran wilayah dapat mengatasi masalah ketertinggalan daerah. Dengan pemekaran ini, daerah berpeluang besar untuk lebih menarik perhatian dan menghilangkan keterbelakangan dan keterbelakangan.

Dunn dalam Novita (2015:162) memaparkan analisis munculnya kebijakan pemekaran daerah dengan bagian sebagai berikut: Pertama, perumusan masalah politik, dengan setiap langkah perumusan masalah membutuhkan kompetensi rasionalitas. Alasan bukan hanya tentang menemukan deskripsi formal yang memadai dari masalah menggunakan metode teknis, seperti model matematika. Namun yang lebih penting, ini adalah tentang menemukan deskripsi konseptual yang memadai tentang masalah tersebut, yang membutuhkan kesadaran diri dan perspektif kritis. Kedua, ini tentang mengubah kebijakan menjadi strategi dan alat pemecahan yang menghasilkan informasi tentang kemungkinan tindakan di masa depan. Juga memiliki konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Perumusan kebijakan adalah tentang mengubah informasi tentang kebijakan (program) masa depan menjadi informasi tentang kebijakan yang akan menghasilkan hasil yang berharga.

Subarsono (2005:3) berpendapat bahwa formulasi kebijakan merupakan uraian memberikan pilihan kebijakan yang paling unggul atas pilihan kebijakan lainnya. Oleh karena itu, proses pemilihan alternatif harus

didasarkan pada kriteria yang jelas dan transparan sehingga ada alasan untuk memilih atau menolak alternatif kebijakan. Dalam konteks ini, aspek rasional dari alternatif menjadi pertimbangan utama dalam memilih kebijakan/program alternatif. Tujuan pemekaran daerah pada hakekatnya bertujuan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan sebagai alat pendidikan kewarganegaraan di tingkat lokal. Oleh karena itu, dalam pembentukan daerah, beberapa faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, serta aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan harus diperhatikan sebagai aspek penting. Kondisi yang memungkinkan daerah mewujudkan dan melaksanakan tujuan pembentukannya, berdasarkan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah.

Kelurahan merupakan organisasi pemerintahan terdekat serta berhubungan langsung dengan masyarakat. Lurah memimpin keberhasilan Pemerintahan Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan publik masyarakat, dimana terlibat langsung dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai bagian dari wilayah kecamatan/kelurahan di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dijalankan oleh Lurah. Pembentukan pengaduan ditentukan oleh peraturan daerah (Nurcholis, 2010:525). Dari segi keilmuan, pelayanan publik dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan saling berhubungan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama melalui

penyelenggaraan, pengelolaan serta berbagai urusan pelayanan publik memenuhi kepentingan masyarakat (Mulyadi, 2015:1).

Kota Bima salah satunya terbagi dalam 5 wilayah yaitu Kecamatan Asakota, Rasanae Barat, Mpunda, Raba dan Rasanae Timur, dengan keseluruhan awal jumlah yaitu terdapat 38 kelurahan. Sejak tahun 2020 terjadi pemekaran kelurahan dengan adanya peraturan daerah di Kecamatan Rasanae Timur yaitu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Pemekaran No. 10 Tahun 2017. Alasan adanya Kelurahan baru yaitu Kelurahan Oi Mbo terbentuk bertujuan memudahkan masyarakat guna memperoleh pelayanan umum. Kemudahan tersebut baik dari sarana jalan memperpendek waktu tempuh tidak terlalu jauh yang awalnya 5 Km menjadi hanya sekitar 2 Km dari ibukota kecamatan. Selain itu masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari pada kelurahan sebelumnya dilihat dari jumlah SDM yang melayani. Berikut data pegawai kelurahan Oi Mbo.

Tabel 1.1 Data SDM Pegawai Kelurahan Oi Mbo

| No | Nama                     | Jabatan            | Pendidikan |
|----|--------------------------|--------------------|------------|
| 1  | Juraidin, S. Sos         | Kepala Kelurahan   | S1         |
| 2  | Abdul Gafur, SE          | Sekretaris Lurah   | S1         |
| 3  | Indar Komalasari, SE     | Kasie Pemerintahan | S1         |
| 4  | Nurjanah, S. Sos         | Kasie Ekonomi      | S1         |
| 5  | Kar'an, S. Sos           | Kasie Pembangunan  | S1         |
| 6  | Abdul haris              | Staff              | SMA        |
| 7  | Emiyati                  | Honorar            | SMA        |
| 8  | Muhammad                 | Penjaga            | SMA        |
| 9  | Aryo Firmansyah, S. Pd   | Honorar            | S1         |
| 10 | Mia Jumiati              | Honorar            | SMA        |
| 11 | Ratnah                   | Honorar            | SMA        |
| 12 | Rahmah                   | Honorar            | SMA        |
| 13 | Yuyun Kusumawati, S. Kom | Honorar            | S1         |
| 14 | Bayu budiansyah          | Honorar            | SMA        |
| 15 | Darmayani                | Honorar            | SMA        |

|    |                      |          |     |
|----|----------------------|----------|-----|
| 16 | Ade kurniawan, S. Pd | Honorier | S1  |
| 17 | Ramdoan              | Honorier | SMA |
| 18 | Yayu Kusumawati      | Honorier | SMA |
| 19 | Kalisom              | Honorier | SMA |
| 20 | Ayu                  | Honorier | SMA |

Sumber: Kepegawaian Kelurahan Oi Mbo, 2021

Tenaga administrasi pelayanan tersebut merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah untuk perwujudan pelayanan publik dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kelurahan Oi Mbo memiliki keleluasaan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Menurut hasil wawancara dengan Pak Abdul Gafur (Sekretaris Lurah Oi Mbo), evaluasi kebijakan pemekaran sangat memudahkan dalam dalam otonom anggaran pembangunan prasarana maupun sarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pelayanan bagi masyarakat.

Selama implementasi penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur perangkat daerah telah mengalami perubahan. Kelurahan bukan lagi lembaga daerah melainkan lembaga kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima. Disusul dengan Peraturan Walikota (Perwali) No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Walikota Bima Tahun 2016 Nomor. 65 tentang kedudukan, struktur organisasi dan komitmen serta tanggung jawab serta alur kerja desa. Pejabat kepala Kelurahan adalah Lurah yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab kepada Camat. Peran Lurah sebagai pejabat membantu camat dalam mengelola urusan administrasi, keuangan, dan pembangunan di wilayah Kelurahan. Oleh karena itu, pemberian pelayanan

kepada masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, dimana pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam rangka tugas aparatur negara pada saat penyelenggaraan pemerintahan. pegawai negeri Secara khusus merujuk pada pelaksanaan tugas manajemen publik melalui pembentukan sistem manajemen dari level tertinggi (tingkat pusat) hingga level terendah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara umum.

Saat kunjungan ke kantor lurah Oi Mbo, pegawai banyak yang tidak berada di tempat saat jam kantor. Aspek lain terlihat pelayanan tidak terlalu sopan membuat masyarakat merasa kecil hati ketika meminta tolong layanan. Selain itu pengurusan administrasi masih memiliki kekurangan yaitu proses penandatanganan terkesan lambat serta pelayanan pendataan masyarakat miskin tidak pas pada sasaran.

Melihat kendala pelayanan yang terjadi di Kelurahan Oi Mbo sebenarnya tidak dapat dibedakan dengan kinerja pejabat pemerintah. Efisiensi secara umum dapat dipahami sebagai kontribusi yang dilakukan pegawai terhadap kemajuan dan perkembangan lembaga tempatnya bekerja. Oleh karena itu efisiensi dipahami sebagai derajat pencapaian hasil, sehingga diketahui pencapaian tugas pekerjaan yang diberikan serta kewenangan dan optimalisasi hasil kerja berupa pelaksanaan secara maksimal (Mulyadi, 2015:1).

Tentunya jika kita melihat kembali pemerintahan Kelurahan Oi Mbo sebelum dipecah khususnya dalam hal pelayanan publik terdapat perbedaan

yaitu bahwa Lurah Oi Mbo melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui sikap dan keberadaan Lurah yang ramah, mudah ditemukan oleh komunitas, sehingga proses pendaftaran tepat waktu.

Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai hal-hal masih belum sesuai harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Tentunya tindak lanjut dari perpanjangan pengaduan ini berdampak pada peningkatan pelayanan administrasi. Hasil wawancara awal dengan Sekretaris Kepala Desa Oi Mbo, Abdul Gafur, SE mengungkapkan bahwa pendekatan pelayanan yang dilakukan melalui penyuluhan dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan wilayah utama. Semakin luas cakupan wilayah pelayanan menjadi penyebab tidak efisiennya pelayanan ketersediaan pelayanan publik bagi masyarakat. Aparatur pelaksana yang relative kurang dalam proses pembangunan daerah baru masih terbatas sesuai dengan kebutuhan daerah.

Namun pada kenyataannya, dalam kondisi bidang kepegawaian, aparatur pemerintahan Kelurahan Oi Mbo menawarkan beberapa pelayanan diantaranya pelayanan administrasi, seperti pengurusan pengurusan pengurusan perkawinan dari berbagai instansi seperti pertanian dan perikanan memerlukan tanda tangan Lurah untuk menawarkan program bantuan. dari instansi terkait. Oleh karena itu, keberadaan Kantor Kelurahan Oi Mbo sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam hal pelayanan administrasi.

Jika kita melihat kondisi pemerintahan Kelurahan saat ini, apa yang disebut dengan “Evaluasi” sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga

harapannya output kerja oleh pelaksana layanan dapat memberikan dampak baik bagi kehidupan masyarakat kemudian dianalisa dengan mencoba mengevaluasi pelayanan publik yang dilaksanakan atau akan dilaksanakan dan sejauh mana kinerja aparatur pemerintah Oi Mbo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang berjudul: “EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KELURAHAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN OI MBO KOTA BIMA”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah evaluasi kebijakan pemekaran wilayah di Kelurahan Oi Mbo dalam mencapai tujuan pelayanan publik di Kota Bima?
2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan publik melalui kebijakan pemekaran Kelurahan Oi Mbo Kota Bima?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui serta menganalisis hasil evaluasi kebijakan pemekaran wilayah Kelurahan Oi Mbo Kota Bima.
2. Guna mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan publik melalui kebijakan pemekaran Kelurahan Oi Mbo Kota Bima.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Secara Akademis**

Untuk manfaat akademik, penelitian ini bertujuan memperkaya khasana ilmu pengetahuan dalam bentuk referensi, informasi dan insentif yang berguna bagi pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

### **1.4.2 Secara Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan informasi tentang peran pengelola pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai aktor dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Oi Mbo Kota Bima.

### **1.4.3 Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki program terkait surat keterangan tidak mampu dan kartu disabilitas guna mewujudkan pemerataan kinerja aparatur kelurahan Oi Mbo Kota Bima.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan hasil kajian berbagai referensi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam referensi atau sumber kajian berupa, buku, tesis, disertasi dan jurnal yang masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, keberadaan penelitian terdahulu dapat menjadi latar belakang pertimbangan penulis selama penyusunan tulisan skripsi ini.

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kajian teoritis berasal dari jurnal maupun skripsi yang memeliti variabel yang sesuai dengan penelitian dalam skripsi ini. Adapun penelitian yang menunjang tersebut terdiri dari:

Dimas Ratu Tiemority dan Didik Gunawan Suharto (2021) mengkaji “Aspek Administratif dan Politik Kebijakan Pemekaran Desa Surakarta”. Persamaan penelitian ini terletak pada pendekatan kebijakan penyuluhan desa dan penelitian yang sama yaitu kualitas deskriptif dan perbedaan penelitian ini. mengkaji berbagai masalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran Kampung Semanggi di Kota Surakarta berhasil meyakinkan pemangku kepentingan tentang alasan pemekaran, termasuk meyakinkan masyarakat setempat untuk mendukung keberadaan kampung tersebut. Pedoman Pemekaran Desa Semanggi, Kota Surakarta.

Zarrah (2020) meneliti tentang “Evaluasi Pemekaran Wilayah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gayo Lues” Hasil kajian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Gayo Lue dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pelayanan publik harus meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah dalam melayani warganya. Kesamaan dalam penelitian ini terkait dengan penilaian pemekaran wilayah, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terkait dengan lokasi yang berbeda.

Takwa (2019) meneliti tentang “Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur desa tanah putih selalu memegang komitmen dalam suatu kebijakan yang disepakati secara bersama masyarakat, Kepala Desa juga selalu mengontrol kinerja dari pegawai-pegawainya supaya para pegawainya tidak lalai dalam tanggung jawabnya, guna untuk menjadikan aparatur Desa Tanah Putih yang berketerampilan. Persamaan penelitian yaitu menganalisis pelayanan publik akibat pemekaran desa.

Riri Rezeki Hariani (2018) meneliti tentang “Evaluasi Kinerja Aparat Pemerintahan Kelurahan Dalam Pelayanan Publik” Persamaan dalam penelitian yang sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini melihat permasalahan yang berbeda. Hasil kajian menunjukkan bahwa efisiensi merupakan indikasi menunjukkan bentuk keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan kebijakan, program dan

kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Temuan dalam penelitian ini menyatakan kinerja aparatur pemerintah Desa Kenangan Baru dalam meningkatkan pelayanan publik masih dikatakan kurang optimal.

Eko Setiawan (2016) meneliti tentang “Evaluasi Kebijakan Pemekaran Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara”. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis evaluasi politik pemekaran daerah. Bedanya peneliti sebelumnya menggunakan penelitian komparatif dengan pendekatan kualitatif sedangkan peneliti ini hanya menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara pada wilayah pelayanan kepada masyarakat pasca pemekaran semakin meningkat terutama jarak yang ditempuh masyarakat untuk memberikan pelayanan sehingga pembangunan semakin dekat dan akan lebih berpengalaman. dari segi perkembangan.

Yani Wahdini (2015) meneliti tentang “Dukungan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Wacana Pemekaran Rumbai Tahun 2014”. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama focus permasalahan terhadap pemekaran wilayah. Perbedaannya terletak pada metode menggunakan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Mix Methods). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rencana pemekaran Rumbai masih kurang didukung oleh masyarakat karena tidak melihat dampak positif pemekaran yang menghasilkan output mensejahterakan masyarakat yang ada.

Table 2.1 Penelitian terdahulu

| No | Nama Penulis / Tahun                                 | Judul   | Hasil Penelitian   | Persamaan / Perbedaan  |
|----|--|---|--|--|
| 1  | Dimas Ratu Tiemority dan Didik Gunawan Suharto /2021 | <i>Aspek Administrasi dan Politik dalam Kebijakan Pemekaran Kelurahan di Kota Surakarta</i>                       | Pelaksanaan kebijakan pemekaran di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta telah berhasil meyakinkan stakeholder dalam menjalankan perannya, terkait argumentasi dilakukannya pemekaran, termasuk pendekatan pada masyarakat setempat agar masyarakat ikut mendukung adanya kebijakan pemekaran Kelurahan di wilayah tersebut. | Persamaan dalam penelitian yaitu meneliti kebijakan pemekaran kelurahan dan pendekatan penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif sedangkan perbedaan dari penelitian ini meneliti permasalahan yang berbeda |
| 2  | Zarrah / 2020  | <i>Evaluasi Pemekaran Wilayah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gayo Lues</i>                             | Peran pelayanan publik kepada masyarakat pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi kualitas memerlukan sumberdaya dari aparat pemerintah ditingkatkan dalam melayani publik   | Persamaan penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Pemekaran Wilayah sedangkan perbedaan dari penelitian ini meneliti di tempat yang berbeda  |
| 3  | Takwa / 2019   | <i>Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima</i> | Aparatur desa tanah putih selalu memegang komitmen dalam suatu kebijakan yang disepakati secara bersama masyarakat, Kepala Desa juga selalu mengontrol kinerja dari pegawai-pegawainya supaya para pegawainya tidak lalai dalam tanggung jawabnya, guna untuk menjadikan aparatur Desa Tanah Putih yang berketerampilan  | Persamaan penelitian yaitu menganalisis pelayanan publik akibat pemekaran desa sedangkan perbedaan dari penelitian ini meneliti di tempat yang berbeda   |
| 4  | Riri Rezeki Hariani / 2018                           | <i>Evaluasi Kinerja Aparat Pemerintahan Kelurahan Dalam Pelayanan Publik</i>                                      | Dalam melaksanakan kebijakan kinerja sebagai wujud dari kemampuan dan keberhasilan suatu organisasi, program serta kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Kelurahan Kenangan Baru dalam penelitian ini menganalisis kinerja Aparat Pemerintahan belum berjalan dengan baik dalam                        | Persamaan dalam penelitian sama menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaan dari penelitian ini meneliti permasalahan yang berbeda  |

|   |                     |  |   |   |
|---|---------------------|--|---|---|
|   |                     |  | meningkatkan Pelayanan Publik di Kelurahan tersebut.  |   |
| 5 | Eko Setiawan / 2016 | <i>Evaluasi Kebijakan Pemekaran Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara</i> | Dalam bidang pelayanan kepada masyarakat, Pemekaran Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara setelah diadakan pemekaran telah mengalami peningkatan khususnya akses jalan memperpendek jarak tempuh masyarakat sehingga menjadi lebih dekat serta peningkatan kualitas dari aspek pembangunan | Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis evaluasi kebijakan pemekaran wilayah perbedaannya peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian komparatif dengan pendekatan kualitatif sedangkan peneliti ini hanya menggunakan metode penelitian kualitatif |
| 6 | Yani Wahdini / 2015 | <i>Dukungan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Wacana Pemekaran Rumbai Tahun 2014</i>                | Masyarakat tidak meyakini rencana pemekaran Rumbai sehingga masyarakat tidak mendukung karena merasa pemekaran nantinya hanya akan mensejahterakan masyarakat yang ada di Rumbai  | Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama focus permasalahan terhadap pemekaran wilayah. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Mix Methods)   |

Sumber: data primer diolah, 2022

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa hampir semua peneliti ingin menganalisis dan mengetahui evaluasi kebijakan pemekaran daerah terhadap kinerja pelayanan publik. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa banyak daerah yang melakukan pemekaran wilayah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama ingin menganalisis apa yang membedakan lokasi penelitian ini.

Perbedaan penelitian saya sebelumnya dengan penelitian saya adalah lokasi penelitiannya berbeda dan penelitian sebelumnya lebih fokus pada kehidupan masyarakat di wilayah tersebut karena adanya kebijakan pemekaran itu sendiri. Sementara penelitian saya lebih fokus pada evaluasi

penerapan kebijakan pemekaran daerah terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Konsep Evaluasi**

Evaluasi pada hakekatnya adalah suatu proses mengukur dan membandingkan hasil aktual kegiatan operasional dengan hasil yang seharusnya dicapai sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Bukan di PPnya. Menurut UU No. 39 Tahun 2006, pengertian evaluasi adalah serangkaian tindakan dimana pelaksanaan masukan, keluaran dan hasil dibandingkan dengan rencana dan standar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Provinsi, tujuan pembentukan daerah pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial.

Menurut Suchman yang dikutip oleh Arikunto, Jabari dan Abdul, evaluasi dipandang sebagai suatu proses penentuan hasil yang dicapai dalam suatu rangkaian kegiatan terencana yang mendukung tercapainya tujuan. Proses evaluasi itu sendiri adalah:

Pertama, input digunakan sebagai masukan untuk membuat sistem bekerja. Evaluasi pada tahap awal program bertujuan untuk memastikan bahwa rencana yang dilaksanakan konsisten dengan masalah yang diidentifikasi. Kedua, proses (process) adalah proses yang perlu mengubah input menjadi hasil yang dirancang (output).

Tujuan dari evaluasi proses adalah untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai dengan rencana semula. Keluaran ketiga adalah hasil dari proses evaluasi untuk menunjukkan apakah program mempengaruhi perilaku sesuai rencana. Output keempat adalah hasil dalam jangka waktu yang lama. Waktu Penilaian dampak memberikan gambaran umum atau informasi tentang mortalitas, perubahan penyakit dan produktivitas.

Evaluasi memiliki beberapa fungsi kunci dalam analisis kebijakan;

1. Bentuk Pertama dan terpenting, evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang tindakan politik, terutama tentang sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang telah dipenuhi oleh tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi menunjukkan seberapa jauh tujuan tertentu (misalnya meningkatkan kesehatan) dari tujuan tertentu.
2. Kedua, evaluasi berkontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai di balik pemilihan sasaran. Nilai-nilai dibuat jelas melalui definisi dan implementasi tujuan dan sasaran. Nilai juga dikritik secara sistematis dengan mempertanyakan kesesuaian tujuan dan sasaran dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi. Ketika analisis mempertanyakan kecukupan tujuan dan sasaran, dia dapat menguji alternatif. Sumber nilai dan dasarnya dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, hukum, sosial, material).



3. Ketiga, evaluasi mendorong penggunaan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang kinerja kebijakan yang buruk dapat membantu merumuskan kembali masalah kebijakan, misalnya dengan menyarankan bahwa tujuan dan sasaran perlu didefinisikan ulang.

### **2.2.2 Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Anderson dalam Winarno (2016:3) Evaluasi atau evaluasi kebijakan secara umum dapat dianggap sebagai tindakan yang berkaitan dengan evaluasi atau evaluasi kebijakan, yang meliputi isi, implementasi, dan dampak implementasi. Dalam hal ini, penilaian/evaluasi kebijakan dianggap sebagai kegiatan operasional; Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya berlangsung pada fase akhir, tetapi sepanjang proses politik, yaitu pada tahap perumusan masalah politik, tahap implementasi dan tahap hasil dan efek kebijakan.

Penilaian kinerja/penilaian adalah proses yang digunakan oleh manajer untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Beberapa ahli lainnya juga mengemukakan pendapat yang berbeda, yaitu:

Evaluasi karyawan adalah penilaian sistematis terhadap kinerja dan potensi karyawan untuk dikembangkan. Penilaian adalah proses menafsirkan atau menentukan nilai, kualitas atau status berbagai objek, orang atau barang (Mangkunegara, 2000:10).

Lester dan Stewar dalam Winarno, (2016:561) mengemukakan bahwa evaluasi/penilaian kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda yaitu:

1. Tugas pertama adalah menentukan konsekuensi dari suatu kebijakan dengan menjelaskan pengaruhnya. Tugas ini mengacu pada upaya untuk menentukan apakah program kebijakan publik mencapai tujuan dan hasil kebijakan yang diinginkan/diharapkan.
2. Tugas lainnya adalah mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dengan menggunakan standar atau kriteria yang diberikan. Tugas kedua ini adalah untuk menilai apakah kebijakan tersebut berhasil memberikan efek yang diinginkan atau tidak.

Dari pandangan Anderson, Lester dan Steward dapat diketahui bahwa salah satu tujuan evaluasi/evaluasi kebijakan adalah menilai dampak implementasi kebijakan. Dengan kata lain, tujuan/sasaran evaluasi/evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut mempunyai dampak yang diinginkan/diharapkan atau tidak.

### **2.2.3 Tahapan Evaluasi Kebijakan**

Menurut W. Dunn, istilah evaluasi memiliki arti yang mirip, masing-masing mengacu pada penerapan berbagai skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Penilaian meliputi kesimpulan + penjelasan + kritik + koreksi dan perumusan kembali masalah.

Edward A. Schuman mengusulkan enam langkah evaluasi politik, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- 2) Analisis masalah
- 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- 4) Mengukur sejauh mana perubahan yang terjadi
- 5) Tentukan apakah perubahan yang diamati adalah hasil dari tindakan ini atau penyebab lain.

Beberapa indikator untuk menentukan adanya efek.

James Anderson membagi evaluasi politik menjadi tiga jenis :

- 1) Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut urgensi perihal kepentingan (*interest*) dan ideologi dari kebijakan.
- 2) Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.
- 3) Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

#### **2.2.4 Pemekaran Wilayah**

Istilah “memuai” secara etimologis berasal dari kata “mekar”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “memuai” berarti proses menjadi besar (melebar, luas, banyak, luas dll). Definisi "daerah". Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang, ruang yang merupakan kesatuan geografis dan segala unsur terkait berdasarkan batas dan sistem ditentukan berdasarkan sistem pengelolaan dan/atau pertimbangan operasional. Definisi Rustiadi et al. (2009) menunjukkan bahwa suatu kawasan adalah suatu kesatuan geografis dengan batas-batas yang jelas (khusus) dan komponen-komponennya relevan untuk gambaran perencanaan pembangunan dan pengelolaan pembangunan. Pemekaran wilayah adalah pembagian provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua wilayah atau lebih (Banoet, 2013:434).

Berdasarkan hasil penelitian, Hasriani (2016) mengatakan bahwa pemekaran daerah adalah dengan cara membagi atau menaikkan status daerah yang dinilai berpotensi menjadi daerah otonom dan mampu. Dengan asumsi mengurus rumah tangganya sendiri.

Kriteria penilaian pembangunan daerah didasarkan pada tujuan daerah itu sendiri menurut PP 129/2000. Pemekaran wilayah sendiri adalah pembagian provinsi, wilayah administratif, atau wilayah metropolitan menjadi lebih dari satu wilayah. Pasal 2 Bab II menyatakan bahwa tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara:

- Peningkatan layanan perusahaan;
- Mempercepat pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- Mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah;
- Untuk mempercepat pengelolaan peluang daerah;

- peningkatan keamanan dan ketertiban;
- Meningkatkan hubungan harmonis antara pusat dan daerah.

Pemekaran Dari perspektif politik pemerintahan pusat, pemekaran wilayah adalah penambahan wilayah baru (kota, provinsi, kabupaten atau kota). Ketika menambah daerah baru, pemerintah pusat harus menanggung beban, misalnya dengan menambah pengurus daerah dan semua struktur di bawahnya, yang membutuhkan biaya rutin bulanan dan tahunan (Frans, 2000). Pemerintah negara bagian berhak mengeluarkan perintah negara dan perintah lain untuk melaksanakan tugas-tugas otonom dan tambahan. Pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintah daerah yang terdiri dari gubernur, gubernur atau walikota dan perangkat daerah .

### **2.2.5 Tujuan Pemekaran Wilayah**

Widjoyokusumo (2011) mengatakan bahwa awal semangat pemekaran ini secara teoritis merupakan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan manusia serta terwujudnya masyarakat Indonesia yang hidup. Ada dua penyebab meningkatnya fenomena pemekaran wilayah Indonesia, antara lain:

#### **1) Meningkatkan kualitas pelayanan public**

Pendekatan pelayanan pemerintah negara bagian baru harus lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan daerah induk. Luasnya cakupan wilayah pelayanan ibu pertiwi menjadi penyebab tidak efisiennya pelayanan publik yang tersedia. Pelayanan publik

yang tersedia dalam proses perencanaan daerah baru yang lebih terbatas disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Semakin pendeknya jarak dan rentang kendali antara birokrasi dan masyarakat mengakibatkan semakin intensifnya interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik secara memadai. 2) Mempercepat pertumbuhan ekonomi

Diasumsikan bahwa melalui pemekaran daerah, pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipercepat melalui pemanfaatan potensi daerah. Dengan berkembangnya daerah baru, kota memiliki peluang untuk memetakan berbagai peluang ekonomi daerah yang belum terdaftar. Pemekaran daerah juga memungkinkan terciptanya usaha-usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja baik dari sektor formal maupun informal. Penciptaan perusahaan baru diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendukung proses pemerataan dalam pembangunan. Selain pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan, yang terpenting juga adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah diharapkan dapat mendekatkan amanah pelayanan birokrasi negara kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang baik, sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Swaianewicz (pinjaman. Riani, 2012:3) menunjukkan bahwa pemerintah kecil yang lebih homogen cenderung lebih mudah menerapkan kebijakan yang memuaskan preferensi mayoritas rakyat. Berdasarkan

pengamatannya terhadap pemerintahan Eropa Timur, struktur dan ukuran pemerintahan yang lebih kecil dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kesejahteraan. Selain itu, pemerintahan yang lebih kecil memiliki birokrasi yang kecil, sehingga fungsi administrasi berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan pelayanan publik sesuai dengan harapannya. Widjoyokusumo (2011) mengatakan bahwa awal semangat pemekaran ini secara teoritis merupakan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan manusia serta terwujudnya masyarakat Indonesia yang hidup. Ada dua penyebab meningkatnya fenomena pemekaran wilayah Indonesia, antara lain:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan public

Pendekatan pelayanan pemerintah negara bagian baru harus lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan daerah induk. Luasnya cakupan wilayah pelayanan ibu pertiwi menjadi penyebab tidak efisiennya pelayanan publik yang tersedia. Pelayanan publik yang tersedia dalam proses perencanaan daerah baru yang lebih terbatas disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Semakin pendeknya jarak dan rentang kendali antara birokrasi dan masyarakat mengakibatkan semakin intensifnya interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik secara memadai.

## 2) Mempercepat pertumbuhan ekonomi

Diasumsikan bahwa melalui pemekaran daerah, pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipercepat melalui pemanfaatan potensi daerah. Dengan berkembangnya daerah baru, kota memiliki peluang untuk memetakan berbagai peluang ekonomi daerah yang belum terdaftar. Pemekaran daerah juga memungkinkan terciptanya usaha-usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja baik dari sektor formal maupun informal. Penciptaan perusahaan baru diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendukung proses pemerataan dalam pembangunan. Selain pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan, yang terpenting juga adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah diharapkan dapat mendekatkan amanah pelayanan birokrasi negara kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang baik, sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Swaianewicz (pinjaman. Riani, 2012:3) menunjukkan bahwa pemerintah kecil yang lebih homogen cenderung lebih mudah menerapkan kebijakan yang memuaskan preferensi mayoritas rakyat. Berdasarkan pengamatannya terhadap pemerintahan Eropa Timur, struktur dan ukuran pemerintahan yang lebih kecil dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kesejahteraan. Selain itu, pemerintahan yang lebih kecil



memiliki birokrasi yang kecil, sehingga fungsi administrasi berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan pelayanan publik sesuai dengan harapannya..

Pada dasarnya tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik (UU No. 22 Tahun 1999). Sistem birokrasi yang lebih kecil diharapkan dapat mempercepat tumbuhnya kehidupan demokrasi, sehingga masyarakat bersama pemerintah daerah dapat berpartisipasi dalam usahanya membangun perekonomian daerah dan mengelola potensi daerah. Selain itu, pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

#### **2.2.6 Kelurahan**

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berada di bawah kecamatan. Kelurahan adalah satuan kecamatan yang dikepalai oleh seorang kepala kelurahan. Pembentukan pengaduan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Lurah diangkat oleh Kepala Negara/Walikota atas usul Camat pejabat yang memenuhi persyaratan. Lurah menerima sebagian kekuasaan pemerintahan dari kepala negara/walikota. Selain tugas

berdasarkan tugas direktur/perwakilan walikota, Lurah bertugas mengawasi kegiatan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta memelihara prasarana dan pelayanan penyelenggaraan kemasyarakatan. Dalam memenuhi kewajibannya, Lurah bertanggung jawab kepada gubernur/walikota melalui Camat.

Menurut Pasal 23(3) Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang pengangkatan pejabat daerah untuk jabatan Lurah dan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat/kota masing-masing. Kelurahan adalah kawasan multi-permukiman yang melaporkan organisasi administrasi terendah langsung kepada Camat dan tidak berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya Republik Indonesia, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 yang mengatur tentang desa. Pasal 1(5) Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Pengurus Kelurahan terdiri atas Kepala Kelurahan dan para pejabat Kelurahan yang membantu pelaksanaan tugas pengurus.

Berdasarkan uraian di atas, Kelurahan merupakan bagian paling bawah dari organisasi Camat dan dipimpin oleh seorang kepala

Kelurah yang bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan memegang posisi yang sangat penting bagi negara :

- 1) Sebagai pengetahuan, informasi, tenaga penggerak, kepemimpinan dan kontrol;
- 2) Sebagai benteng terakhir pengamalan Pancasila.
- 3) Sebagai pusat penumbuhan dan peningkatan semangat gotong royong dalam segala bidang kehidupan dan kehidupan
- 4) Mendorong partisipasi masyarakat di segala bidang
- 5) Meningkatkan ketertiban dan persatuan nasional untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional .

#### **2.2.7 Kinerja**

Kinerja atau prestasi adalah catatan hasil yang dicapai dalam tugas atau kegiatan kerja tertentu selama periode waktu tertentu (Ruky dalam Diah, 2014). Kinerja suatu organisasi merupakan respon atas berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Supervisor atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali situasinya benar-benar buruk atau terjadi kesalahan. Terlalu sering manajer tidak mengetahui berapa banyak penurunan kinerja, membuat perusahaan/lembaga berada dalam masalah besar. Kesan organisasi yang buruk mengarah pada tanda-tanda peringatan kinerja yang buruk dan mengabaikannya. Kinerja merupakan ekspresi kerja staf dan organisasi. Penampilan kerja tidak hanya terbatas pada orang yang

bekerja pada jabatan fungsional atau struktural, tetapi juga pada staf seluruh organisasi (Lyas en Diah, 2014).

Kinerja adalah gambaran tingkat pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi yang dituangkan dalam rencana strategis organisasi. Istilah prestasi sering digunakan untuk menggambarkan prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu (Mahsum dalam Mulyadi, 2015)

#### **2.2.8 Pelayanan publik**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi penting dari mesin pemerintahan dan pada hakekatnya sangat luas karena melibatkan pelayanan kebutuhan masyarakat dengan kepentingan dan kebutuhan yang sangat berbeda. Menurut Mahmud (2010), semua kegiatan pelayanan penyelenggara pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dan melaksanakan peraturan hukum dianggap sebagai pelayanan publik.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai penyediaan (melayani) kebutuhan orang atau masyarakat yang berkepentingan dengan organisasi menurut prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan (Joko dalam Sadhana, 2010). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan

penduduk yang berkaitan dengan barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh masyarakat. penyedia layanan.

Pelayanan pemerintah sama dengan apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang disediakan pemerintah. Jadi jika masyarakat menginginkan layanan ini murah, cepat diproses dan berkualitas, maka pemerintah tidak boleh memberikan izin yang berbeda seperti SIM, KTP, IMB atau akte kelahiran yang mahal, profesionalisme yang tidak lengkap dan kualitas yang buruk.

Meskipun istilah publik berasal dari bahasa Inggris (*public*), di Indonesia terdapat beberapa pengertian dengan arti yang berbeda yaitu *public*, *society* dan *state*. Kita dapat menemukan masyarakat pada umumnya, atau masyarakat dalam pengertian penawaran umum, milik umum dan pelayanan umum, hubungan masyarakat, pelayanan umum, kepentingan umum (kepentingan umum), dan lain-lain.

Dari perspektif pemerintah, ini termasuk otoritas publik (badan pemerintah), gedung publik (gedung pemerintah), pendapatan publik (pendapatan pemerintah) dan sektor publik (sektor pemerintah). Dalam hal ini pelayanan publik dipahami sebagai istilah publik yang lebih sesuai dengan pengertian masyarakat atau masyarakat umum. Namun, pemahaman umum terkait pelayanan publik tidak sepenuhnya sejalan dengan pemahaman masyarakat .

### 2.2.9 Kinerja Pelayanan Publik

Sebagai pelayanan publik, keuntungan mencakup segala sesuatu yang disediakan oleh pemerintah atau sektor swasta, karena masyarakat pada umumnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri kecuali secara kolektif untuk menjamin kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan (Lonsdake dalam Sadhana, 2010).

Prinsip-prinsip Manajemen Pelayanan Publik pada hakekatnya merupakan implementasi dari Prinsip-Prinsip Inti yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik. Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang ditetapkan dalam Keputusan MENPAN No. 81 Tahun 1993, maka pengelolaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Kesederhanaan

Kesederhanaan ini berarti bahwa orang yang meminta layanan dapat dengan mudah melakukan pemeliharaan. Prinsip kesederhanaan umumnya lebih menekankan pada aspek prosedural penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk persyaratan dan rekayasa operasional. Ketika menyusun kebijakan atau kesepakatan untuk prosedur penyampaian layanan publik, ini harus dirumuskan atau diatur dalam urutan atau mekanisme alur kerja yang sederhana, yaitu. H. tidak banyak simpul/tabel atau petugas/tugas yang terlibat yang tidak terkait dengan tugas pokok. bertindak

dalam proses pelayanan. Namun kesederhanaan prosedur ini, tanpa mengurangi atau mengabaikan unsur legalitas atau legitimasi dari hasil penyelenggaraan pelayanan itu sendiri.

## 2. Kejelasan dan kepastian

Asas kejelasan dan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan publik menekankan pada:

- Dalam hal prosedur penyediaan layanan, alur kerja harus diperhatikan, yaitu H. harus diperhatikan bahwa hal ini dijelaskan dengan jelas dan aman dalam bentuk bagan alur, dan informasi tentang layanan yang akan didukung (misalnya nama loket/meja/petugas) juga harus lengkap dan tidak ambigu sesuai dengan tugasnya.
- Urutan pemrosesan atau diagram alir layanan dan nama loket dan karyawan masing-masing perusahaan harus divisualisasikan, dipublikasikan secara terbuka dan jelas.

## Kenyamanan

Prinsip ini mengatur bahwa dalam proses penyelenggaraan pelayanan harus tercipta kondisi dan mutu dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Aman dalam arti proses penyelenggaraan pelayanan maupun kualitas produk pelayanan publik dapat menimbulkan rasa aman bagi masyarakat,

2. Nyaman dalam arti terciptanya kondisi dan kualitas proses penyelenggaraan pelayanan,
3. Rapihnya, bahwa dalam proses pemberian pelayanan harus dimungkinkan terciptanya pelaksanaan yang bersih, berwawasan prosedural, urutan pemberian pelayanan rutin tidak amburadul sesuai tahapan penyesuaian kerja.

#### 4. Transparansi

Prinsip pembukaan pelayanan adalah memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat (pemohon) tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu, asas ini harus bertujuan untuk: (1) menginformasikan secara terbuka tentang alat pelayanan, (2) menyediakan alat media (seperti: papan buletin, papan informasi, saran, dll.), (3) Organisasi program konsultasi untuk lokasi.

#### 5. Efektif

Obat yang efektif ini; (1) Persyaratan layanan dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan layanan, dengan memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk layanan yang ditawarkan. (2) Dicegah terjadinya pengulangan pemenuhan persyaratan terkait proses kepegawaian yang bersangkutan.



## 6. Keuangan

Asas ini mensyaratkan pemberian pelayanan selengkap mungkin, merata, dan berlaku adil pada semua lapisan masyarakat. Prinsip ini mensyaratkan bahwa biaya untuk penyediaan layanan harus ditentukan secara adil. Pelayanan publik harus mengadopsi prinsip ekonomi.

### 2.3 Kerangka Berpikir

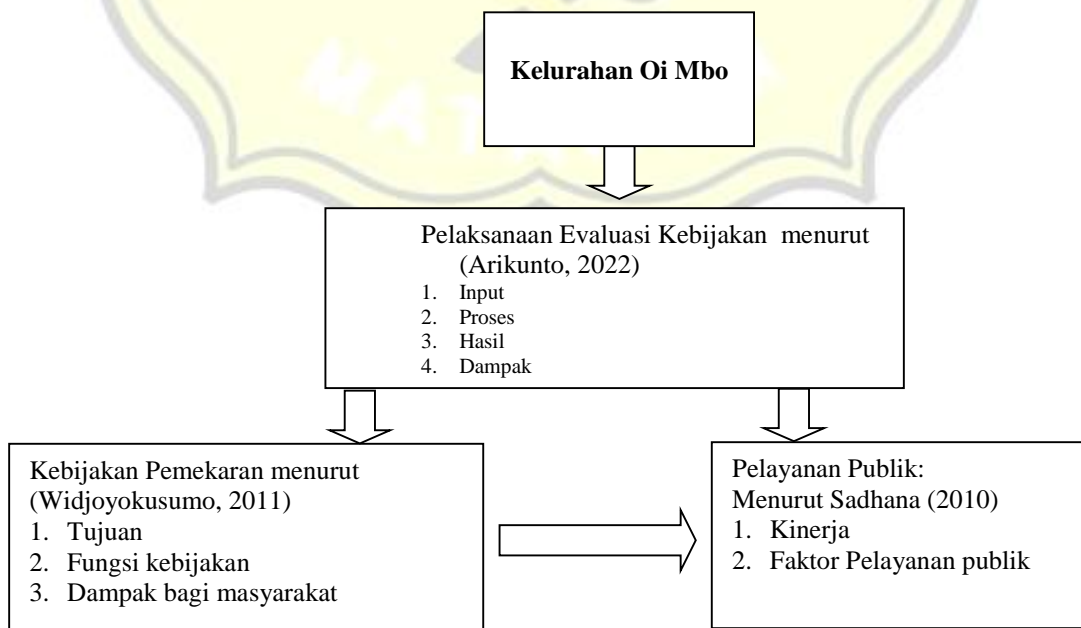
Pemekaran Kelurahan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan pemekaran Kelurahan, diharapkan koordinasi menjadi lebih mudah. Pemekaran Kelurahan ini tentunya menjadi ujung tombak pengabdian masyarakat. Sebab, pengaduan merupakan penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dengan masyarakat luas. Fungsi koordinasi dan pembinaan RW dan RT menjadi tanggung jawab Kelurahan. Yang lebih penting adalah mengembangkan lembaga desa lebih lanjut. Selain itu, masyarakat semakin mengkritisi buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, yang dapat menimbulkan citra kurang baik dari aparat pemerintah itu sendiri.

Carl Fredrick, dalam Abdulwahab (2009), mendefinisikan kebijakan pemerintah dalam lingkungan tertentu dan menunjukkan hambatan dan peluang untuk menerapkan kebijakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Agustino (2006), Anderson mendefinisikan politik sebagai rangkaian tindakan dengan tujuan tertentu, ditujukan dan dilaksanakan oleh

seorang aktor atau sekelompok aktor untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Jenkis (dalam Abdulwahab, 2009), berpendapat bahwa politik adalah rangkaian keputusan dan tindakan.

Biasanya, pembentukan daerah otonom baru dapat dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan membagi daerah otonom. Hal ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 No. 23. Dalam kehidupan pemerintahan di satu sisi tuntutan kebutuhan masyarakat diharapkan semakin berkembang dan kompleks, sedangkan di sisi lain kebutuhan Kegiatan pemenuhan segala kebutuhan masyarakat harus dianggap kurang optimal karena berbagai permasalahan. Alasan, serta alasan lokal, alasan keterbatasan sumber daya dan teknik pengelolaan, dll. Inti dari pemekaran daerah adalah keinginan untuk membawa perubahan yang lebih baik melalui otonomi. Dari uraian tersebut, flowchart dapat digambarkan sebagai berikut :

### Bagan Kerangka Pikir



## 2.4 Definisi Konseptual dan Operasional

Konsep definisi konseptual dan definisi operasional diperlukan untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian. Definisi konsep dibagi menjadi dua bagian, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional.

### 2.4.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah objek penelitian yang menjelaskan karakteristik masalah yang diteliti. Oleh karena itu, untuk memahami teori-teori sebelumnya dan memudahkan interpretasinya, perlu dipastikan bahwa teori yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan isi kerangka teori peneliti. Definisi konseptual dari setiap variabel dapat direpresentasikan sebagai berikut:

#### A. Pertimbangan

Winarno (2016) dapat dikatakan secara umum bahwa evaluasi atau evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut evaluasi atau evaluasi kebijakan dan mencakup isi, implementasi dan dampak dari implementasi kebijakan.

#### B. Kebijakan Ekspansionis

Widjoyokusumo (2011) mengatakan bahwa awal semangat pemekaran ini secara teoritis merupakan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan manusia serta terwujudnya masyarakat Indonesia yang hidup.

### C. Pelayanan Publik

Mahmudi (2010) mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala kegiatan pelayanan penyelenggara pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

### D. Kinerja Pelayanan Publik

Penyediaan pelayanan publik mencakup segala sesuatu yang disediakan oleh pemerintah atau swasta, karena masyarakat pada umumnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri kecuali secara kolektif untuk menjamin kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan. (Lonsdake dalam Sadhana, 2010).

#### 2.4.2 Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2012:31), definisi operasional adalah penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti.

##### a. Evaluasi Kebijakan

##### 1. Kebijakan Pemekaran:

- a) Tujuan
- b) Fungsi kebijakan
- c) Dampak bagi masyarakat

## 2. Pelayanan Publik

a) Kinerja

**b) Faktor pelaksanaan**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah. Disebut juga metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih sering digunakan dalam penelitian. Dalam bidang antropologi budaya kita berbicara tentang metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat deskriptif (Sugiyono, 2015 1-2).

Metode pendekatan kualitatif mencapai pemahaman dan interpretasi yang mendalam tentang makna, realitas dan fakta yang relevan. Dalam hal ini, untuk menyatakan bahwa penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif, maka data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka (Moleong, 2012).

Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikaji dengan menggambarkan atau menggambar keadaan objek/obyek penelitian (orang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Kali ini dan selanjutnya, coba tawarkan solusi untuk masalah tersebut. Ciri-ciri umum dari metode deskriptif adalah untuk menarik perhatian pada masalah yang ada atau nyata selama investigasi dan untuk menggambarkan fakta dari masalah

yang sedang diselidiki seperti itu, bersama dengan interpretasi rasional (Widi,2010:84).

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN OI MBO KOTA BIMA TAHUN 2020

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian yaitu pada Kantor Kelurahan Oi Mbo Kota Bima. Waktu penelitian dilaksanakan bulan desember 2022 disesuaikan dengan data yang dibutuhkan peneliti tercukupi.

### 3.3 Pemilihan Narasumber atau Responden

Data penelitian diperoleh menggunakan *informan source* sebagai sumber data dengan melakukan wawancara yang mendalam (*indepth interview*). Informan yang dimaksud yaitu objek utama dalam sebuah penelitian. Adapun Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 3.1 Narasumber

| No     | Jabatan                           | Jumlah   |
|--------|-----------------------------------|----------|
| 1      | Kepala Kelurahan                  | 1 Orang  |
| 2      | Sekretaris Lurah                  | 1 Orang  |
| 3      | Aparat Kelurahan                  | 4 Orang  |
| 4      | Tokoh Ketua RW, RT, Karang Taruna | 5 Orang  |
| 5      | Masyarakat                        | 10 Orang |
| Jumlah |                                   | 21 Orang |

Sumber: data primer diolah peneliti

### **3.4 Sumber dan Jenis Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didasarkan pada permasalahan dan tujuan penelitian dan terbagi menjadi dua jenis data yaitu:

#### **3.4.1 Data Primer**

Data primer dalam penelitian diperoleh langsung melalui observasi dan Wawancara dengan Kepala Kelurahan Oi Mbo Kota Bima, Staf, serta masyarakat dan unsur informan yang dapat memberikan keterangan yang terkait dalam penelitian.

#### **3.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder pada penelitian ini di peroleh dari buku-buku, dan literatur serta bahan-bahan tertulis baik dari dalam maupun dari luar yang terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Karya ilmiah membutuhkan kesempatan untuk menemukan dan merasakan lebih dalam fenomena-fenomena tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, kebenaran karya ilmiah dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk mendapatkan data yang diharapkan, penulis kemudian melakukan pengumpulan data berupa:

#### **3.5.1 Teknik Observasi**

Insntumen yang dimaksud ini digunakan didalam pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan secara



langsung tentang masalah yang diteliti yaitu mengenai kebijakan pemekaran kelurahan Oi Mbo Kota Bima.

### **3.5.2 Teknik Interview (Wawancara)**

Wawancara dalam hal ini merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilalmkan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

### **3.5.3 Teknik Dokumentasi**

Metode dokumentasi yang dimaksud mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. (Arikunto, 2006: 231).

## **3.6 Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono (2012) Analisis data dilakukan melalui tiga alur, yakni:

### **3.6.1 Reduksi Data**

Reduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola. Dengan demikian, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas .

### 3.6.2 Tampilan Data

Pada penelitian ini, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang hal-hal yang akan diteliti.

### 3.6.3 Gambar Kesimpulan

Reduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola. Dengan demikian, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas.

